

ISBN 978 - 979 - 8793 - 79 - 0

Proceeding

**Presentasi Hasil Penelitian
Hibah**

**Program Desentralisasi,
Sentralisasi dan Hibah
Internal Unpas Tahun 2014**

**Kampus Unpas IV, Setiabudhi
23 Desember 2014**

Bidang Ilmu Sosial



**Penerbit :
Lemlit Unpas Press**



Rd. Dewi Asri Yustia, S.H., M.H., <i>Mendobrak Kelemahan Litigasi Konvensional Melalui Model Advokasi Mandiri Dalam Rangka Pembaharuan Proses Peradilan : Studi terhadap perempuan pelaku tindak pidana Dalam kasus kdrt</i>	87
Nurhasan, SH.,MH, <i>"Model Kolaborasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Sungai Untuk Mewujudkan Pengelolaan Industri Terintegrasi Di Jawa Barat"</i>	121
Hj. Yayan Mulyana, S.Sos.M.Si <i>"Model Pengembangan Kompetensi Pemasaran Produk Rajut Dalam Meningkatkan Keunggulan Bersaing Ukm Rajut Binongjati Di Kota Bandung"</i>	141
Dr. Undang Juju, SE. MP. <i>"Implementasi Strategi Model Kerja Sama Umk Guna Membangun Kemampuan Bersaing Dan Efektifitas Pemasaran Untuk Meningkatkan Pendapatan Pengrajin Pada Sentra Batik Trusmi Cirebon"</i>	156
Dra. Imas Sumiati, M.Si <i>"Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Trans Metro Bandung"</i>	167
Dr. Tete Saefudin, SE., M.Si, <i>"Analisis Rantai Pasokan Komoditas Florikultura Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Bandung Barat"</i>	178

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Trans Metro Bandung

Oleh :

Dra. Imas Sumiati, M.Si

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pasundan Bandung

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang dan Permasalahan yang diteliti

Kota Bandung merupakan sebuah kota di Provinsi Jawa Barat yang juga merupakan ibu kota provinsi tersebut. Bandung terletak di koordinat 107° BT dan 6°55' LS. Luas Kota Bandung adalah 167,7 km². Kota ini secara geografis terletak di tengah-tengah Provinsi Jawa Barat. Dengan kondisi alam yang indah dan sejuk serta banyaknya tempat pendidikan tinggi di Bandung membuat kota ini memiliki heterogenitas dan tingkat kedatangan pengunjung baik untuk sementara maupun menetap yang tinggi. Hingga tahun 2012 jumlah penduduk Kota Bandung yang terdaftar sekitar 2.420.146 jiwa.

Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung berperan sebagai pusat kegiatan ekonomi, sosial dan pemerintahan. Kegiatan ekonomi di kota Bandung cukup tinggi dan beragam yang mengarah kepada kegiatan jasa dan perdagangan. Sebagai konsekuensi dari fungsi kota yang disandang, maka tidak dapat dipungkiri bahwa pada saat ini pemerintah kota Bandung menghadapi berbagai permasalahan yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar (pemukiman, air bersih, energi, transportasi, dan komunikasi).

Salah satu permasalahan penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan Kota Bandung adalah permasalahan transportasi. Sebagian besar transportasi di kota Bandung terjadi di atas jalan. Dengan besarnya peran jalan raya dalam transportasi kota Bandung, maka kondisi kelancaran transportasi di atasnya perlu dijaga supaya tetap berada di kondisi lancar. Dalam mewujudkan kebutuhan transportasi maka diperlukan suatu perencanaan dan pengaturan. Perencanaan

tersebut salah satunya melalui Perkembangan teknologi yang semakin maju menciptakan peluang bagi Dinas Perhubungan Kota Bandung melalui pelayanan Trans Metro Bandung untuk dapat memanfaatkan teknologi, terutama dalam bidang transportasi darat. Dinas perhubungan Kota Bandung berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan pemerintah daerah di bidang Perhubungan. Sebagai bagian dari unsur pemerintahan daerah secara struktural kepala dinas perhubungan kota Bandung diangkat dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

Tujuan dari TMB adalah perbaikan sistem pelayanan angkutan umum perkotaan, perbaikan manajemen pengelolaan angkutan umum perkotaan, perbaikan pola operasi angkutan umum perkotaan standarisasi armada, dan penghubung simpul transportasi yaitu terminal, stasiun kereta api dan bandara.

Berdasarkan hukum penyelenggaraan angkutan massal bus Trans Metro Bandung yang diatur dalam : a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan pasal 158 ayat 1 Pemerintah menjamin ketersediaan Angkutan Massal berbasis Jalan untuk Memenuhi Kebutuhan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di Kawasan Perkotaan, b) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025; c) Keputusan Walikota Bandung No 551/2/kep/646-huk/2006 tentang Pengoperasian Trans Metro Bandung pada Koridor Cibeureum-Cibiru dan No.551/kep.764/DISHUB/2012 tentang pengoperasian Cicaheum-Cibeureum tanggal 6 November 2012; d) Keputusan Walikota Bandung No 551/2/kep/649-dishub/2008



tentang Tarif Angkutan Umum Massal Bus Trans Metro Bandung; e) Peraturan Walikota Bandung Nomor 704 Tahun tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pengoperasian Trans Metro Bandung; f) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Trans Metro Bandung didasarkan oleh Peraturan Walikota Bandung Nomor 265 Tahun 2008 tentang pembentukan dan susunan organisasi unit pelaksana teknis pada lembaga teknis daerah dan dinas daerah di lingkungan daerah Kota Bandung

Permasalahan yang dihadapi dapat dilihat dari indikator, sebagai berikut :

1. Standar Kebijakan : tidak ada jalur khusus TMB, sebagian besar shelter dibangun di jalan trotoar; kurangnya sarana dan prasarana TMB; kurangnya sosialisasi kepada masyarakat; shelter yang belum teralisasi kepada masyarakat; jumlah armada bis TMB yang kurang;
2. Sumber daya : rendahnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan angkutan masal, kurang optimalnya pengalokasian dana dari pemerintah;
3. Komunikasi dengan berbagai organisasi pelaksana angkutan umum seperti KOBUTRI, KOBANTER, dan lain-lain;
4. Kondisi sosial, politik dan ekonomi Masyarakat yang menginginkan segala sesuatu cepat dan mudah; lebih memilih kendaraan pribadi karena dianggap lebih efektif dan efisien; kurangnya peranan pemerintah dalam pemerataan pembangunan.

Berdasarkan masalah tersebut maka judul penelitian adalah **"Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Trans Metro Bandung"**. Bertolak dari latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan yang akan dibahas adalah : faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan TMB? Apa saja yang menjadi faktor pendukung dibuatnya kebijakan Trans Metro Bandung? Apakah kebijakan Trans Metro Bandung menjadi solusi kemacetan di Kota Bandung ?

1.2 Tujuan Khusus

Mengidentifikasi faktor apa saja yang menyebabkan kemacetan di Kota Bandung; menganalisis kebijakan Trans Metro Bandung dan menganalisis pengaruh kebijakan terhadap solusi kemacetan.

1.3 Urgensi Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengembangan pengetahuan, khususnya Ilmu Administrasi Negara yang diperoleh langsung dari lapangan dan menemukan solusi dari fenomena yang terjadi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Trans Metro Bandung. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis untuk memperkaya dan menambah wawasan.

BAB II

STUDI PUSTAKA

2.1 Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang akan dilakukan penulis adalah tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Trans Metro Bandung. Tujuan dari penelitian ini penulis ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan Trans Metro Bandung (TMB), maka penulis membutuhkan suatu landasan teori atau kerangka pemikiran yang penulis gunakan yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Kebijakan secara epistimologi istilah kebijakan berasal dari Bahasa Inggris *"policy"*. Akan tetapi kebanyakan orang berpandangan, bahwa istilah kebijakan senantiasa disamakan dengan istilah kebijaksanaan. Padahal apabila dicermati berdasarkan tata bahasa, istilah kebijaksanaan berasal dari kata *"wisdom"* Hecllo (1972). Hecllo menggunakan istilah kebijakan secara luas, yakni sebagai rangkaian tindakan pemerintah atau tidak bertindak pemerintah atas sesuatu masalah. Jadi lebih luas dari tindakan atau keputusan yang bersifat khusus. Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai *decision making*, yaitu apa yang dipilih oleh pemerintah untuk mengatasi suatu masalah publik, baik dengan cara melakukan suatu tindakan maupun untuk tidak melakukan suatu tindakan. dengan demikian kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam

mengatasi suatu masalah. Yang menjadi tolak ukur kebijakannya adalah apakah dengan dibentuknya Trans Metro Bandung dapat mengatasi masalah yang selama ini dialami oleh Masyarakat Bandung, yaitu kemacetan.

2.2. Kebijakan Publik

Kebijakan berasal dari bahasa Yunani Sanskerta yaitu dari kata *polis* yang berarti negara kota, kemudian diserap oleh bahasa latin menjadi *politeia* yang artinya negara, selanjutnya diserap lagi oleh bahasa Inggris menjadi *policy* dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang artinya "kebijakan".

Friedrich dalam Suyatna (2009 : 3), mengemukakan definisi kebijakan, sebagai berikut :

Kebijakan adalah Serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan kesulitan-kesulitan dan kemungkinan-kemungkinan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Definisi lain mengenai kebijakan dikemukakan oleh Anderson dalam Suyatna (2009 : 3), bahwa :

Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Berkaitan dengan definisi di atas, dapat diartikan bahwa kebijakan pemerintah memuat adanya organisasi atau pelaku organisasi pemerintah yang berusaha melakukan tindakan nyata untuk mencapai tujuan pemerintah dalam memecahkan suatu persoalan.

2.3. Implementasi Kebijakan

1. Definisi Implementasi

Implementasi merupakan terjemahan dari kata *implementation*, berasal dari kata kerja *to implement*. Menurut Webster's Dictionary dalam Tachjan (2008 : 23), kata *to implement* berasal dari bahasa

Latin *implemum* dari asal kata *impere* dan *plere*. Kata *implere* dimaksudkan *to fill up* : *to fill in*, yang artinya mengisi penuh ; melengkapi, sedangkan *plere* maksudnya *to fill*, yaitu mengisi.

Sehubungan dengan kata implementasi di atas, Pressman dan Wildvsky dalam Tachjan (2006 : 24), mengemukakan, bahwa :

Implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete.
Maksudnya : membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi.

Tachjan (2008 : 24), mengemukakan definisi implementasi, sebagai berikut:
Secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.

2. Definisi Implementasi Kebijakan

Sebuah kebijakan tidak akan memiliki arti tanpa adanya suatu upaya melaksanakan kebijakan secara baik. Walaupun suatu kebijakan memiliki suatu program yang bagus, tetapi apabila tidak diimplementasikan maka akan menjadi suatu hal yang sia-sia. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik, suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Berkaitan dengan hal di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dari keseluruhan proses kebijakan. Udoji dalam Wahab (2008 : 59) dengan tegas mengemukakan, bahwa:

Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting



daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Dipandang dalam definisi yang luas, implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor/pelaku, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersamasama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo (2009 : 88) mengemukakan, bahwa implementasi kebijakan sebagai : Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

2.4. Model Implementasi Kebijakan

Model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2005) menjelaskan bahwa ada 8 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu :

- 1) Standar dan sasaran kebijakan
- Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik di antara para agen implementasi
- 2) Sumber daya
- Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.

- 3) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas
- Dalam berbagai kasus, implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan
- 4) Karakteristik agen pelaksana
- Sejauhmana kelompok/kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan
- Termasuk didalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan
- 5) Kondisi sosial, ekonomi dan politik
- Kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan
- 6) Disposisi implementor
- Disposisi implementor mencakup tiga hal penting, yaitu :
 - a. respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan,
 - b. kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan,
 - c. intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan penelitian

Pendekatan ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena akan mengungkap masalah yang terjadi di pemerintah Kota Bandung, pemilihan lokasi penelitian karena Kota Bandung merupakan kota besar dan sumber kemacetan yang cukup tinggi sehingga dari sisi transportasi terkhusus transportasi umum kota Bandung masih memerlukan penataan sedemikian rupa karena permasalahan kota besar yang cukup kompleks.

3.2. Desain Penelitian

Metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif, penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif, dimana untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek

penelitian masalahnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dalam hal ini peneliti secara langsung terlibat di lokasi penelitian melalui pengamatan, peran serta (participatory observation). Penggunaan pendekatan kualitatif menekankan pada metode kualitatif mengenai apa adanya (das sein) dengan kenyataan yang ada di lapangan (das sollen) melalui kata-kata lisan atau tertulis dan orang dan perilaku yang diamati dalam penelitian ini mengamati koordinasi antar pengelola transportasi umum di Kota Bandung (Studi Trans Metro di Kota Bandung).

3.3. Sumber Data

Jenis data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari informasi berupa informasi dan data dari hasil wawancara dengan pihak yang berkepentingan dan pelaku utama baik dari pejabat pemerintah Kota Bandung, juga lembaga terkait sebagai pengelola transportasi umum di Kota Bandung, terkhusus pengelola TMB.

Sedangkan data sekunder berasal dari artikel, studi literatur, dokumen dan foto, publikasi media massa atau arsip dan dokumen dari instansi terkait pengelola transportasi umum di Kota Bandung.

3.4. Informan Penelitian

Informan yaitu sumber data serta informasi yang memahami, mengetahui dan mengerti dengan masalah yang sedang menjadi fokus penelitian atau masalah yang sedang diteliti. Fakta yang di butuhkan meliputi kata-kata dan tindakan informan yang memberikan data dan informasi tentang pengelolaan transportasi umum dalam hal ini khusus masalah TMB (trans metro bandung) dari key informan melalui proses wawancara dan pengamatan, adapun penentuan informan dilakukan berdasarkan kriteria tertentu artinya hanya dipilih informan yang memenuhi syarat rich cases dan merepresentasikan setting individu, aktivitas dan menggambarkan heterogenitas karakteristik objek peneliti. Tujuan terpilihnya rich cases ini adalah untuk mendapatkan kasus-kasus yang kaya informasi dan memilih orang yang memungkinkan peneliti

menjelajahi budayanya itu sendiri dengan demikian informan akan berada di sekitar lembaga pengelola transportasi umum, dalam hal ini TMB akan terdapat informan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan, yaitu informan yang dapat memberikan data yang akan menunjang tujuan penelitian, dan dapat memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Analisis NVivo Potensi dan kondisi

Dalam memvisualisasikan data yang diperoleh dari wawancara dengan pihak yang berkepentingan dan pelaku utama baik dari pejabat pemerintah Kota Bandung, juga lembaga terkait sebagai pengelola transportasi umum di Kota Bandung, terkhusus pengelola TMB.

Kekuatan

1. Pengakuan eksistensi permasalahan transportasi.
2. Komitmen pemerintah dalam mewujudkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Jasa Transportasi Kota Bandung.
3. Telah terjalannya berbagai kene dan kerjasama dengan berbagai pihak.
4. Bandung diuntungkan dengan pendakian jarak dengan Jakarta dan memiliki fasilitas jalan Tol Jakarta Bandung, yang merupakan keunggulan perkembangan moda transportasi.

Kelemahan

1. Kompetisi SIM pemerintah dan transportasi milik bisnis nasional.
2. Status kepemilikan pemerintah kendaraan angkutan umum masa lalu dan tawar-menawar sebagai pegawai tetap.